

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN PADA  
PENGADAAN BARANG DI PERWAKILAN BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
(BPKP) SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**ANNISA LARASATI CHAIRANI**

**NIM. 07011281621059**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN  
PADA PENGADAAN BARANG DI PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

**ANNISA LARASATI CHAIRANI**  
07011281621059

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2020

Pembimbing 1

Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



Pembimbing 2

Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 19810827 200912 1002



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tanggal 7 Juli 2020.

Indralaya, 7 Juli 2020

Ketua:

1. Drs. Gatot Budianto, MS  
NIP. 195806091984031002



Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827 2009121002



3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



4. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003



Mengetahui

DEKAN FISIP



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827 2009121002

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN  
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Larasati Chairani  
Nim : 07011281621059  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan adalah 7%. Dicek oleh operator \*: 1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan

3. Operatur Fakultas.....

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, Agustus 2020

Menyetujui  
Dosen pembimbing,

Yang menyatakan,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
19810827 2009121002



Annisa Larasati Chairani  
07011281621059

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan” yang merupakan tugas serta kewajiban guna untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Segala bantuan serta bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Chairul Tambunan dan Ibu Nuraini Koryati serta saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran dalam perkuliahan.
9. Seluruh pihak Perwakilan BPKP Sumatera Selatan yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta bimbingannya.
10. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
11. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya,            Juli 2020

Annisa Larasati Chairani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>Bab I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>Bab II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
B. Teori yang Digunakan .....	12
C. Penelitian Terdahulu .....	14
D. Kerangka Pemikiran .....	16
<b>Bab III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Definisi Konsep .....	19
C. Fokus Penelitian .....	19
D. Unit Analisis Data .....	21
E. Informan.....	21
F. Data dan Sumber Data .....	21
G. Teknik Pengumpulan Data.....	22
H. Teknik Analisis Data .....	23

<b>Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum .....	25
B. Hasil dan Pembahasan .....	30
<b>Bab V. PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbedaan definisi pengadaan barang/jasa setelah diberlakukannya Perpres No 16 tahun 2018

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Tabel 4.1 Contoh laporan kegiatan pengadaan

Tabel 4.2 Contoh laporan kegiatan pengadaan langsung

Tabel 4.3 Contoh laporan kegiatan pengadaan barang



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
- Gambar 4.1 Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
- Gambar 4.2 Gedung Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
- Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPKP
- Gambar 4.4 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
- Gambar 4.5 Website LPSE
- Gambar 4.6 Bentuk *e-catalogue*
- Gambar 4.7 Contoh spesifikasi barang yang tertera di *e-catalogue*
- Gambar 4.8 Laporan pengadaan barang secara elektronik

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
IPP	: Instansi Pemerintahan Pusat
JFA	: Jabatan Fungsional Auditor
Kabbag	: Kepala Bagian
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
Perpres	: Peraturan Presiden
PHLN	: Proyek pinjaman hutang luar negeri
PKAU	: Program Kerja Administrasi Umum
PKP2T	: Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan
POKJA	: Kelompok Kerja POKJA
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
SABMN	: Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAP	: Sistem Akuntansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIM-HP	: Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan
SIMPeg	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

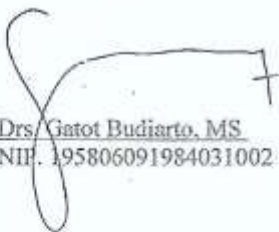
SPK : Surat Perintah Kerja  
SPSE : Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
Subbag : Sub Bagian  
TPTD : Temuan Pemeriksaan yang Tidak dapat Ditindaklanjuti  
UKP : Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

## ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dalam kegiatannya seringkali terjadi penyelewengan berupa korupsi bermodus *mark up* yang membuat kegiatan tersebut memiliki celah bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kegiatan pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, begitupun dengan organisasi sendiri pengadaan barang dan jasa merupakan hal penting dalam menunjang kegiatan organisasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini berupa Deskriptif Kualitatif yang mengkaji data dari wawancara dan pengamatan langsung yang didukung dengan data primer dan data sekunder dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan. analisis pada penelitian ini berupa melihat prinsip – prinsip seperti efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparansi, tidak diskriminatif, dan akuntabilitas sudah diterapkan atau belum pada dua metode pengadaan yaitu pengadaan barang secara elektronik dan pengadaan barang secara konvensional. Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat bahwa pengadaan barang secara elektronik dan pengadaan barang secara konvensional di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan masih ada beberapa prinsip yang belum diterapkan, sehingga munculnya permasalahan yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang.

Kata Kunci: Pengadaan, Prinsip Pengadaan, Pengadaan Barang.

Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Indralaya, 7 Juli 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

*The procurement of government goods and services in Indonesia in its activities often occurs fraud in the form of mark up mode that is made of the activity that has a gap for certain persons to get personal profit. The procurement of goods and services play an important role in the implementation of national development, including its own organization procurement of goods and services is essential in order to support their organization. This research has the objective to know the principle of analysis procurement on procurement of goods at the Indonesia's National Government Internal Auditor of South Sumatera. This research aims to analyze the implementation of procurement principles on procurement of goods in Indonesia's National Government Internal Auditor of South Sumatera. The kind of research is descriptive qualitative that looked at data from the interviews and direct observations that have supported by primary and secondary data from Indonesia's National Government Internal Auditor of South Sumatera. The analysis of this research in the form of seeing the implementation of the principle as efficient, effective, fair competition, openness, transparency, not discriminating, and accountability it has been applied or not yet on two methods of the procurement as the procurement of goods in electronically and procurement of goods in conventional. Through research can be seen that procurement electronically and procurement conventionally in Indonesia's National Government Internal Auditor of South Sumatera there were several principles that have not applied, and the problems that occur on the procurement of goods.*

*Keyword : Procurement, procurement principles, procurement of goods.*

Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Indralaya, 7 Juli 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam mempertahankan keberadaan suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan salah satu wujud dari *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien, efektif, dengan menjaga kesingergian interaksi yang konstruktif diantara domain – domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan barang pada umumnya di lingkungan pemerintah Indonesia menggunakan pengadaan barang secara konvensional berupa pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender, sedangkan untuk pengadaan barang secara elektronik sendiri berupa *e-purchasing* dan *e-tendering*. Pada awalnya pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sendiri seluruhnya menggunakan pengadaan secara konvensional, namun beberapa tahun kebelakang mulai munculnya sistem yang membuat pengadaan dapat dilakukan secara elektronik yang diharapkan mampu mengatasi kelemahan dari sistem pengadaan yang sebelumnya.

Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun diseluruh dunia (OECD, 2007). Indonesia sendiri memiliki catatan pada tahun 2019 ada sebanyak 61 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dilihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengadaan barang/jasa secara konvensional masih memiliki celah untuk oknum – oknum melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga pengadaan secara elektronik menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang timbul akibat pengadaan secara konvensional.

Adanya pengadaan secara elektronik diharapkan dapat menurunkan angka korupsi yang berhubungan pengadaan barang/jasa dengan adanya keterlibatan teknologi didalam kegiatannya. Persoalan mengenai pengadaan secara konvensional menurut Purwanto (2008) menyatakan beberapa hal berupa minimnya monitoring, penyalahgunaan wewenang, penyimpanan kontrak, kolusi, manipulasi dan tidak transparan serta lemahnya SDM. Pelaksanaan pengadaan secara konvensional merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa pemerintah yang telah dilaksanakan dalam waktu yang panjang dan sudah sangat *familiar* bagi para pelaksananya, namun seringkali terjadi penyimpangan didalam pelaksanaannya. Maka dari itu mulai muncul sebuah sistem pengadaan secara elektronik yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan – permasalahan yang terjadi di pengadaan secara konvensional, namun melaksanakan pengadaan secara elektronik di ruang lingkup pemerintah bukan hal yang mudah untuk dilakukan, banyak tantangan maupun hambatan yang terjadi dalam prosesnya. Diperlukannya waktu dan usaha bagi pihak pemerintah/lembaga agar pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya serta dibutuhkan aturan yang tepat

sebagai acuan dalam pelaksanaannya, kemudian perlunya pelatihan terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa atau sumber daya manusianya, serta perlunya dukungan fasilitas – fasilitas pendukung pengadaan yang memadai sehingga pengadaan secara elektronik dapat dilakukan dengan maksimal.

Pengadaan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintahan Indonesia saat ini masih dilakukan secara konvensional dan elektronik, namun pengadaan elektronik diharapkan dapat digunakan lebih dominan sehingga menghindari permasalahan yang disebabkan oleh pengadaan konvensional. Pengadaan secara konvensional dan pengadaan secara elektronik sendiri masih memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, untuk pengadaan konvensional sendiri secara garis besar memiliki kelebihan berupa penyedia lebih *familiar* terhadap pengadaan tersebut karena sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan untuk kekurangannya sendiri berupa seringkali menjadi peluang bagi oknum – oknum menyedia melakukan tindak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sedangkan untuk pengadaan elektronik sendiri memiliki kelebihan berupa pelaksanaannya dilakukan sistem yang berbasis internet sehingga pengadaan lebih terbuka dan transparan, untuk kekurangannya sendiri berupa masih ada pelaksana pengadaan atau sumber daya manusia yang tidak semuanya memahami penggunaan internet dan belum *familiar* dengan sistem berbasis internet.

Pada penelitian yang dilakukan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, kegiatan pengadaan yang dilihat berupa pengadaan barang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengadaan barang secara konvensional dan pengadaan barang secara elektronik. Pengadaan barang secara konvensional di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan merupakan cara yang dilakukan dalam mendapatkan barang yang sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan untuk beberapa tahun belakang ini



yaitu seringkali dengan penunjukkan langsung sedangkan pengadaan secara elektronik mulai dilakukan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan beberapa tahun terakhir saat ini dilakukan menggunakan *e-purchasing*.

Kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan menggunakan cara secara konvensional maupun elektronik sudah seringkali dilakukan namun didalam kegiatannya masih ada saja hal – hal yang tidak dilakukan dengan maksimal yang menimbulkan permasalahan. Pengadaan barang yang dilakukan secara konvensional seringkali dalam pelaksanaannya masih memilih pihak pengada yang terdahulu atau yang sering digunakan, sedangkan untuk pengadaan secara elektronik seringkali dialihkan ke pengadaan konvensional karena dianggap lebih mudah pelaksanaannya.

Melihat dari munculnya permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip pengadaan pada pengadaan barang di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, agar kedepannya kegiatan pengadaan di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan menerapkan prinsip pengadaan yang ada. Maka penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang Secara Elektronik di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Pengadaan Pada Pengadaan Barang Secara Konvensional di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis mengenai prinsip yang diterapkan pada pengadaan barang di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui prinsip apa saja yang telah diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang secara konvensional dan pengadaan barang secara elektronik di Perwakilan BPKP Sumatera Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini berupa memberikan kontribusi berupa bagi kajian Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Manajemen Sektor Publik serta sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya terutama pada penelitian pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian berupa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Perwakilan BPKP Sumatera Selatan untuk memaksimalkan penerapan prinsip dalam kegiatan pengadaan barang barang secara konvensional maupun elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Australian Government Information Management Office (AGIMO). 2000. *Commonwealth Electronic Procurement, Implementation Strategy, Attorney-General's Department, Canberra*.
- Christopher & Schooner (2007). *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market. Journal of International Law*
- Giri Suchayo, Yudho Giri, dkk. 2009. *Inovasi Layanan Publik melalui E- Procurement*, diambil dari Makalah Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik. Bappenas. Jakarta: LKPP
- Hardjowijono, B. Dan Muhammad, H. (2009). *Prinsip Dasar dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta Selatan : Indonesia Procurement Watch
- Marbun, Rocky. 2010. *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*. Jakarta: Visi Media
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- OECD (2007). *Policy Roundtables Public Procurement 2007*.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2008. *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Jakarta: Kemitraan dan LPSE Nasional
- Putu, I. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sleman : CV Budi Utama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Teo, T.S.H. dan Lai, K., 2009. *Usage and Performance Impact of Electronic Procurement. Journal of Business Logistics*
- Weele, A. V. 2010. *Purchasing and Supply Chain Management*. London: Cengage Learning EMEA.
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Situs Resmi BPKP 2019. <http://www.bpkp.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2019.
- Situs Resmi BPKP 2019. <http://www.bpkp.go.id/sumsel.bpkp>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2019.

Situs Resmi LKPP. <http://www.lkpp.go.id>. Diakses pada tanggal 3 November 2019

